BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah dan beranekaragam yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu modal utama pembangunan. Seperti pada sektor pertanian terdiri dari, padi, jagung dan kedelai. Kemudian, pada sektor perkebunan meliputi, karet, kelapa sawit dan lada. Selanjutnya, pada sektor kehutanan seperti pinjam pakai kawasan hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Pada sektor industri pengolahan terdapat kilang minyak, industri LNG dan industri pupuk. Pada Sektor pertambangan dan penggalian, terdiri dari batubara dan migas. Serta sektor pariwisata yang terdiri dari potensi wisata budaya, sejarah, dan objek wisata alam, *(Bappeda.Kaltimprov.go.id).*

Pada tahun 2017 di Indonesia terdapat 3 provinsi dengan realisasi belanja modal terendah yaitu, Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan timur dan DKI Jakarta. Provinsi Kalimantan Timur menempati urutan ke 32 dari 34 Provinsi di Indonesia atau urutan ke 3 (tiga) terendah yang memiliki realisasi belanja modal dibawah 80%. Realisasi belanja modal Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 yaitu 78,74% dari anggaran belanja modal. Namun, 4 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014-2017 realisasi Belanja Modal pada Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami fluktuasi dengan realisasi belanja modal dibawah 100%.

Tabel 1.1

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Pada Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2014-2017

	Belanja Modal Kalimantan Utara	Belanja Modal DKI Jakarta	Belanja Modal Kalimantan Timur
2014	84,21%	35,86%	75,53%
2015	92,38%	50,11%	95,7%
2016	67,49%	52,75%	87,1%
2017	67,66%	69,55%	78,74%

Sumber:djpk.kemenkeu.go.id (data diolah tahun 2019)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa realiasasi belanja modal DKI Jakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berbeda dengan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi baru yang diresmikan pada tahun 2012 dan sedang dalam masa pembangunan, sehingga realisasi belanja modalnya masih terhitung cukup besar. Sedangkan provinsi Kalimantan timur dengan wilayah yang cukup besar dan memiliki sumber daya yang melimpah, seharusnya realisasi belanja modal provinsi Kalimantan Timur dapat mencapai target atau melebihi target dari anggaran belanja modal. Namun, realisasi belanja modal pada Provinsi Kalimantan Timur kurang dari 100%. Dari uraian tersebut peneliti tertarik dan memilih Kalimantan Timur sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberlakukannya tonomi daerah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien dan mengembangkan potensi daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah. (Guritno & Suzan, 2015). Menurut Nordiawan (2006) dalam penelitian (Suprayitno, 2015), melalui otonomi daerah, diharapkan mampu mendorong

pemerataan pembangunan sehingga tidak terjadinya ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing antara daerah dengan memperhatikan unsur pemerataan, demokrasi, keistimewaan dan kekhususan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi daerah dapat ditingkatkan melalui peningkatan anggaran belanja daerah (Jurniawan & Suryantini, 2018).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual 02 Paragraf 07 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja daerah dikelompokkan terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga. Kelompok belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Menurut Undang-Undang Dasar No 18 Tahun 2016 Belanja Modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Belanja modal patut diperhitungkan karena berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Dalam pemahamannya belanja modal berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas agar menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat (Jurniawan & Suryantini, 2018).

Dengan adanya belanja modal maka suatu daerah dianggap akan mampu melayani kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan meningkatkan investasi modal serta dampaknya akan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat (Guritno & Suzan, 2015). Namun, alokasi belanja modal relatif lebih kecil dibandingkan dengan alokasi belanja pegawai atau alokasi belanja daerah lainnya

yang dirasa kurang produktif. Realisasi belanja modal pada Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014-2017 mengalami kenaikan dan penurunan namun jumlahnya tidak signifikan. Data realisasi belanja modal pada Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut :

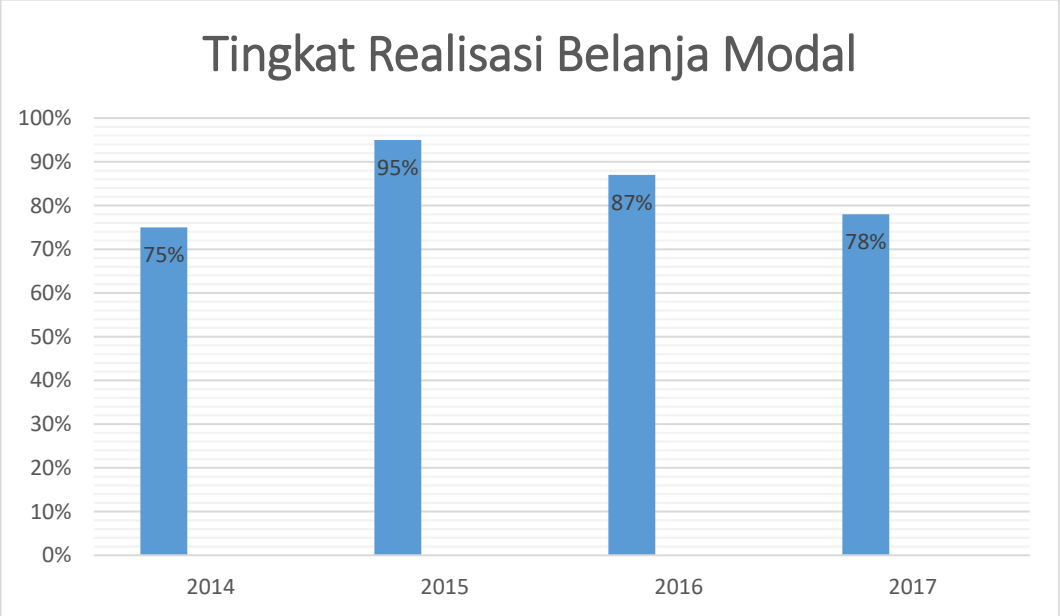

Gambar 1.1 Tingkat Realisasi Belanja Modal Kalimantan Timur Tahun 2014-2017

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (data diolah tahun 2019)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 sebesar 75% hal tersebut disebabkan jumlah belanja operasional lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja modal. Capaian realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan salah satunya disebabkan oleh realisasi pembangunan jalur irigasi sebagai rangkaian program pemerintah terkait upaya khusus (UPSUS) pengembangan ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Kemudian Pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 95% peningkatan tersebut disebabkan fokus pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pendorong naiknya realisasi belanja modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Realisasi belanja modal tahun 2016 yaitu sebesar 87%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2015 terdapat penurunan realisasi disebabkan belanja modal yang sejak awal dialokasikan jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Penyebab lainnya adalah belum meratanya pelayanan infrastruktur yang berkualitas dan adanya pemotongan/penghematan belanja negara. Kemudian pada tahun 2017, sebesar 78% hal ini dikarenakan APBD 2017 terjadi kenaikan pada belanja pegawai dan penurunan pada belanja modal dan belanja barang dan jasa dibanding tahun 2016. Penurunan belanja modal berupa penghentian pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) dan penghentian/pembatalan beberapa proyek.. Besaran belanja modal APBD yang terealisasi di tahun 2017 sebenarnya tidak sepenuhnya untuk membiayai pembangunan di tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan APBD 2017 pada beberapa Pemerintah Daerah juga digunakan untuk membayar utang atas penyelesaian pekerjaan di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, belanja modal belum bisa 100 persen dikorelasikan dengan perkembangan pembangunan fisik di tahun bersangkutan. *(Kaltimprov.go.id).*

Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya realisasi belanja modal adalah infrastruktur yang ada, tidak memadai dan tidak ada penambahan yang signifikan dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru yang menyebabkan para investor swasta nasional maupun investor asing enggan berinvestasi didaerah sehingga perekonomian daerah tersebut tidak berkembang yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan akan selalu bergantung dari APBN dan APBD sebagai penggerak utama perekonomian. (Deskripsi dan Analisis APBD, 2014 dalam Kasdy, Nadirsyah, & Fahlevi, 2018). Pemerintah daerah diarahkan untuk bisa dalam mengelola penerimaan daerahnya sendiri yang ditunjukkan untuk pembangun perekonomian daerah. Peningkatan desentralisasi berkaitan dengan bagaimana daerah mampu dalam menggali penerimaan atau pemasukan yang berasal dari daerah itu sendiri (Jurniawan & Suryantini, 2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) (Guritno & Suzan, 2015) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (Napitu, Dillak, & Kurnia, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi alokasi belanja modal (Sari, Kapramareni, & Novitasari, 2017). Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. PAD bagian dari pemasukan daerah yang digali dari sumber daya yang tersedia di daerah tidak termasuk dana perimbangan dan penerimaan lainnya, (Jurniawan & Suryantini, 2018), Berdasarkan UU No.32 tahun 2004, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, (Soekarwo, 2003 dalam Kasdy *et al.*, 2018)). Ketika PAD meningkat dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah. Maka jika PAD meningkat maka Belanja Modal pun akan meningkat, (Hairiyah et al., 2017).

Menurut PP No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pemerintah harus memastikan kecukupan PAD dan menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah untuk mengalokasikan belanja modal (Febrina, Rahayu, & Dillak, 2016). Namun yang terjadi pada Provinsi Kalimantan Timur menggambarkan hal sebaliknya, seperti pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan realisasi PAD dengan realisasi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Belanja Modal
2014	Rp.9.084.172.730.119	Rp.12.363.938.485.334
2015	Rp.7.044.938.252.925	Rp.13.080.301.188.145
2016	Rp.6.140.310.013.530	Rp.6.615.501.487.828
2017	Rp.7.236.755.080.236	Rp.5.342.672.347.317

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah tahun 2019)

Dilihat pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi belanja modal lebih besar daripada pendapatan asli daerah yang dihasilkan. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah PAD dari tahun 2014 hingga 2016. Dikutip dari Beritasatu.com hal ini dikarenakan adanya kelebihan suplai pasar internasional sehingga mempengaruhi rendahnya permintaan batubara nasional, ini membuat Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil batubara harus mengurangi produksi batubara pada tahun 2015 sehingga mempengaruhi pajak yang dibayarkan kepada daerah Provinsi Kalimantan timur dan mengakibatkan rendahnya pendapatan asli daerah, (beritasatu.com).

Sehingga idealnya, ketika PAD defisit maka harus dilakukan penghematan belanja modal, namun data menunjukkan ketika PAD defisit daerah tidak serta-merta melakukan penghematan belanja modal. Menurut Sri Mulyani dikutip dari CNNIndonesia, belanja modal harus terus-menerus dilakukan untuk kelangsungan pertumbuhan perekonomian, dengan contoh belanja modal dalam bentuk infrastuktur yang dapat menunjang fasilitas ekonomi perdagangan suatu daerah, (cnnindonesia). Kemudian, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dapat memanfaatkan penerimaan dari sumber lain dari pemerintah pusat untuk mendanai belanja modal.

Dalam penelitian (Jurniawan & Seuryantini, 2018) Pendapatan Asli Daerah atau PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal karena PAD yang meningkat akan memberikan manfaat untuk meningkatkan penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan sarana dan prasarana terutama pembangunan infrastruktur. Sedangkan penelitian (Kasdy et al., 2018), menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan kepada publik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal (Sari et al., 2017). Menurut Sukarna (2013:4) dalam (Jurniawan & Suryantini, 2018). Pembagian Dana Alokasi Umum daerah dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang didapatkan dari selisih kebutuhan daerah dengan kemampuan yang dimiliki daerah. Pemberian Dana

Alokasi Umum untuk daerah yang memiliki keuangan mencukupi namun keperluan keuangannya kecil maka mendapatkan anggaran DAU yang kecil, begitu juga sebaliknya. DAU yang semakin besar diberikan dari pusat, maka belanja modal akan semakin besar yang dianggarkan (Novianto dan Hanafiah, 2015). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar/tinggi Dana Alokasi Umum maka akan semakin besar juga alokasi belanja modalnya, (Suryana, 2018).

Dalam penelitian (Guritno & Suzan, 2015) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal karena daerah yang memiliki dana alokasi umum yang besar maka alokasi anggaran untuk belanja modal akan meningkat. Sedangkan penelitian (Hairiyah et al., 2017) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh 8tatisti terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya.

Selain PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, (Sari et al., 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran selanjutnya disingkat dengan SiLPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Lebih/kurang SiLPA suatu daerah tentunya perlu disikapi dengan kebijakan pembiayaan Daerah, (Jikwa, Salle, & Allo, 2016).

Bila terjadi surplus maka daerah harus menggangarkan untuk pengeluaran pembiayaan tertentu semisal untuk investasi atau dapat juga dengan mengoptimlisasi dana tersebut untuk mendanai belanja kegiatan yang telah direncanakan. Akan tetapi bila terjadi defisit maka daerah perlu mencari alternatif pembiayaan yang bisa berupa pinjaman daerah, penggunaan SiLPA atau melakuan penghematan anggaran dengan melakukan penyisiran kegiatan yang tidak perlu atau ditunda pelaksanaannya, (Jikwa *et al.*, 2016).

Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal. SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat untuk meningkatkan belanja modal,

maka dari itu Sisa lebih pembiayaan anggaran meningkat maka belanja modal juga akan meningkat sangat pesat (Sari et al., 2017).

Dalam penelitian (Kasdy *et al.*, 2018) menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal sedangkan (Napitu et al., 2018) menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki pengaruh 9tatisti terhadap belanja modal disebabkan semakin tinggi surplus pada periode tertentu maka alokasi penerimaan untuk membiayai belanja semakin kecil.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang bebeda-beda maka penulis termotivasi untuk menganalisa lebih jauh mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal dengan objek Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2017**".

1.3 Perumusan Masalah

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang bagan Akun Standar menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal (Sari *et al.*, 2017). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah (Soekarwo, 2003 dalam Kasdy *et al.*, 2018). Selain PAD, Dana Alokasi Umum dapat dimanfaatkan pemerintah daerah Kalimantan Timur untuk mendanai belanja modal serta kegiatan lainnya. Begitu juga dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya, SiLPA hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat untuk meningkatkan belanja modal.

Akan tetapi Faktanya, ketika Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Timur rendah, belanja modalnya cenderung lebih besar dari jumlah PAD. Selain itu, Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2017 cenderung berfluktuasi dan tidak berbanding lurus dengan realisasi belanja modal pada periode bersangkutan. Disisi lain ketika SiLPA turun, belanja modal pun cenderung turun. Dari masalah-masalah yang telah dipaparkan maka dilakukan penelitian mengenai Belanja Modal dan yang mempengaruhinya pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 hingga Tahun 2017.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis dapat mengidentifikasi masalah dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2017?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan terhadap Belanja Modal pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2017?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2017?
4. Bagaimana Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap belanja modal pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2017?
5. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial terhadap Belanja Modal pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, secara simultan terhadap belanja modal pada Kalimantan Timur Tahun 2014-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal pada Kalimantan Timur Tahun 2014-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Belanja Modal pada Kalimantan Timur Tahun 2014-2017.
5. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial terhadap Belanja Modal pada Kalimantan Timur Tahun 2014-2017.

1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik pihak yang membaca maupun kepada pihak yang secara langsung terkait dengan penelitian ini. Terdapat dua aspek manfaat dari penelitian yaitu :

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman teoritis yang lebih mendalam dan referensi demi berkembangnya dunia pendidikan mengenai faktor faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

1.6.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kalimantan Timur dan masyarakat umum untuk memahami keterkaitan antara Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel penelitian

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel dependen yaitu belanja modal, dan tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa lebih Perhitungan Lebih anggaran (SiLPA). Penelitian ini akan mengkaji pengaruh Belanja Modal baik secara simultan maupun secara parsial.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Objek penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Serta Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Timur dan website resmi Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi atas 5 (lima) bab yang saling berkaitan dengan isi di setiap babnya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar ssbelakang penelitian yang didalamnya membahas fenomena yang layak untuk diteliti serta dikaitkan dengan teori yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Selain itu, bab ini menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian dan rincian objek penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang menjawab atau menjelaskan masalah

penelitian yang meliputi uraian mengenai karakteristik penelitian, alat pengumpulam data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan dan sumber data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas penjelasan dari hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dalam mendukung penelitian kemudian dianalisis, serta dikaitkan dengan landasan teori yang relevan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilaksanakannya penelitian serta disajikan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.